**PELAKSANAAN PERKAWINAN SESUKU MASYARAKAT SUKU MELAYU BERDASARKAN
HUKUM ADAT DI NAGARI PADANG SIBUSUK
KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG**

Oleh : Annisa Desria Utami

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H, M.H

Pembimbing 2 : Dr. Hayatul Ismi, S.H, M.H

Alamat : Jl. Jati Gang Jati 3 Tangkerang Utara, Pekanbaru

Email : annisadesria08@gmail.com – Telepon : +6285263326783

ABSTRACT

Minangkabau adheres to the matrilineal kinship system. Matrilineal kinship system is a kinship system by drawing lineages based on maternal lines. Every offspring born from a marriage will enter his mother's family. A marriage in minangkabau has a broad meaning. It is not just a meeting two peoples but more broadly because it involves families of both parties. The marriage of the minangkabau community is exogamy. Exogamy which is done outside the tribe. It means that a person who wants to get married must find a partner outside her/his tribe. The peoples who are married with some tribe called "tamakan pokok". Minangkabau marriage is regulated in a religious and customary manner.

Some problem that will be discussed in this thesis namely: First, how to carry out the inter-tribal marriage to melayu tribe community of Nagari Padang Sibusuk Kupitan Sub-District, Sijunjung Regency. Second, is the application of a marriage ban on intertribal marriage still maintained bt melayu tribe community of Nagari Padang Sibusuk, Kupitan Sub-District, Sijunjung Regency.the type of research is use sociological research, the form of the research is a law identification (unwritten law).

The result of study can be concluded namely: First, the implementation of marriage between fellow members of the melayu tribe can occur as long as they come from different rumah gadang. Second, the prohibition on inter-tribal still runs in Nagari Padang Sibusuk, but in Melayu tribes it is possible to do marriage with fellow melayu tribes as long as they come from different rumah gadang. Of course, it will have an impact on the traditional order and the community life.

Keywords : Marriage - Customary Law - Minangkabau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan telah hidup bersama sama dengan manusia lainnya karena pada hakikatnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Kecendrungan untuk hidup bersama juga akan timbul pada seorang pria dan wanita yang mana akan menimbulkan suatu perkawinan. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang kedua duanya bukan muhrim.¹

Perkawinan ialah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.² Perkawinan adalah sebuah lembaga hukum yang memberikan hak-hak tertentu atas orang-orang yang memilih masuk ke dalamnya.³ Perkawinan ialah suatu hal yang penting baik bagi individu dan masyarakat. Khususnya bagi individu perkawinan merupakan cara untuk pembentukan suatu keluarga baru.⁴

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) dengan pada suatu sisi wanita (istri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang

sebagai ikatan suci (ikatan lahir batin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan merupakan suatu kontrak dalam arti bahwa masing-masing harus setuju untuk masuk kedalamnya dan terikat oleh konsekuensi hukum dan juga status.⁷

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan.⁸ Minangkabau menganut sistem kekerabatan berdasarkan matrilineal. Matrilineal yaitu terdiri dari dua kata yaitu Matri artinya ibu dan Lineal artinya garis.⁹ Jadi, Sistem kekerabatan matrilineal berarti sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis keturunan ibu. Kehidupan sebagai individu dan kehidupan sebagai anggota masyarakat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tersebut. Setiap individu akan melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan neneknya. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan masuk kedalam kerabat ibu.

Perkawinan dalam adat minangkabau berbentuk perkawinan semenda. Perkawinan semenda pada umumnya berlaku pada masyarakat matrilineal, dengan maksud mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada wanita, sebagaimana di minangkabau berlaku pelamaran dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.¹⁰

Minangkabau mendasarkan keturunannya berdasarkan garis ibu (matrilineal) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu (Matrilineal)
2. Ikatan kesukuan terbentuk menurut garis ibu
3. Perkawinan keluar suku (eksogami)

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta: 2002, hlm.8.

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Universitas Islam Sultan Agung, Yudisia, Vol. 7, No.2 Desember 2016, hlm. 414.

³ Cece Cox, To Have and to Hold - or Not: The Influence of the Christian Right on Gay Marriage Laws in Canada and the United States, 2006 J. Inst. Just. Int'l Stud. 23 (2006)

⁴ Amicus Brief, Brief of Amici Curiae Asian American Bar Association of the Greater Bay Area & 62 Asian Pacific American Organizations in Support of Respondents Challenging the Marriage Exclusion, 14 Asian Pac. Am. L.J. 33, 34 (2009)

⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" ,Artikel Jurnal Pada *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.1 Tahun 2012, hlm.24.

⁷ Jonathan Herring, et. al., Ante-nuptial agreements: fairness, equality and presumptions, L.Q.R. 2011, 127(Jul), 335-339.

⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung: 1996, hlm. 123.

⁹ Zamris Dt R Sigoto, *Budaya Alam Minangkabau*, Jasa Surya, Padang: 2013, hlm. 5.

¹⁰ A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 27.

¹¹ Edison dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2010, hlm.317.

4. Kekuasaan terhadap kemenakan ada pada mamak
5. Perkawinan bersifat matrilineal (suami bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga istri)
6. Warisan diturunkan dari mamak ke kemenakan
7. Mamak bertanggung jawab terhadap kehidupan kemenakannya

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki laki dan perempuan dalam masyarakat minangkabau diatur menurut adat, syarak dan undang-undang atau peraturan.¹² Perkawinan itu merupakan urusan bersama kedua kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami yaitu dilakukan diluar sukunya. Artinya dilarang perkawinan sesuku. Seorang laki- laki melangsungkan perkawinan atau menikah tidak termasuk kedalam kaum kerabat istrinya dan ia tetap menjadi anggota kerabatnya.¹³ Perkawinan di minangkabau juga bersifat matrilineal. Setelah terjadi perkawinan, pengantin laki-laki akan diantarkan oleh kerabatnya ke rumah istrinya dan kemudian menetap di rumah (kerabat) istrinya.¹⁴

Perkawinan eksogami di Minangkabau melarang kawin sesuku. Seseorang yang ingin menikah haruslah mencari calon suami atau istri dari luar suku mereka. Jika terjadi perkawinan sesuku maka akan menjadi bahan ejekan bagi masyarakat dalam suatu nagari. Orang yang menikah sesuku disebut "*tamakan pokok*".¹⁵ Perkawinan sesuku dilarang karena orang yang satu suku itu dikatakan orang yang badunsanak (bersaudara). Ini merupakan suatu adat yang telah ada dan turun temurun.

Namun sekarang telah terjadi perkawinan sesuku di masyarakat. Perkawinan sesuku besar dampaknya terhadap kekerabatan:¹⁶

1. Kedudukan masing-masing kelompok telah diatur oleh adat itu sendiri. Apabila terjadi musyawarah atau upacara yang dilaksanakan dalam kaum atau suku tersebut, kedudukannya di rumah itu bersifat ganda. Artinya ia sebagai mamak dan juga sebagai sumando. Dalam suatu upacara atau perhelatan kaum, mamak duduk menghadap ke kamar atau membelakang jalan

masuk. Sedangkan urang sumando duduk membelakang kamar.

2. Siapakah bako anak-anak yang lahir dari suku itu? Padahal ia berada di suku itu juga. Disini akan terjadi kebingungan karna di satu sisi si anak anggota suku tersebut namun disisi lain ia juga membako pada suku itu juga.

Nagari Padang Sibusuk terletak di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Di Nagari Padang Sibusuk terdapat 6 suku, yaitu Caniago, Sikumbang, Dalimo, Ponggang, Cupak dan Melayu.¹⁷

Di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Sibusuk melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan dua sistem yaitu secara agama dan adat.¹⁸ Di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung terjadi perkawinan sesuku. Hal ini terjadi antara sesama anggota suku Melayu. Perkawinan sesama suku Melayu bisa dilakukan asalkan mereka berasal dari Rumah Gadang yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok pokok permasalahan yang diangkat yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul **Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Masyarakat Suku Melayu Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?
2. Apakah penerapan larangan perkawinan sesuku masih dipertahankan oleh masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?

¹² Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. Sako Batuah, Padang: 2002, hlm. 46.

¹³ *Ibid.* hlm. 47.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zulkarnaini, *Loc.cit.*

¹⁶ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit.* hlm. 53

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Safirullah Datuak Bosa, Niniak Mamak di Nagari Padang Sibusuk, Senin 12 Maret 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hasmizon Pandito Malin Putiah Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sesuku masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan larangan perkawinan sesuku masih dipertahankan oleh masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan sesuku masyarakat suku Melayu berdasarkan hukum adat di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami dan menghindari perkawinan sesuku sehingga adat dapat tetap terjaga.

D. Kerangka Teori

1. Teori Receptie

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Horgonje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori receptio in complexu. Salah satu yang membawa namanya dikenal luas adalah teorinya yang dikenal dengan *Receptie*, yang kemudian teori tersebut didukung kuat oleh dua sarjana Belanda berikutnya: Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Ter Haar.¹⁹ Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat,

sedangkan hukum Islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.²⁰

Dengan demikian menurut teori ini Receptie berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.²¹

2. Teori Receptio In Complexu

Teori Receptio In Complexu dikemukakan oleh Van Den Berg. Inti dari pada teori ini adalah selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama dengan setia.²²

Jadi tegasnya menurut teori Receptio in Complexu, kalau suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal itu dianggap sebagai penyimpangan dari hukum agama. Teori ini mendapatkan banyak kritikan dari beberapa ahli lainnya, antara lain Van Ossenbruggen, LA Naderburgh, Van Vollenhoven, Piepers, W. B Bergsma dan Snouck Horgonje dengan mengemukakan teori Receptie.²³

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²⁴
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵
3. Sesuku yaitu memiliki suku yang sama. Suku atau matriclan merupakan unit utama dari

²⁰ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 20

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Widjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta: 1995, hlm.29.

²³ *Ibid*

²⁴ Kbbi.web.id, diakses, tanggal, 11 Februari 2018.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹<https://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/christiaan-snouck-hurgonje-teori-receptie/>, tanggal 10 April 2018.

diakses,

susunan masyarakat minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau apabila ia tidak mempunyai suku.²⁶ Sesuku mengandung makna sekaki, seperempat bagian dari seekor hewan ternak.²⁷

4. Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.²⁸ Sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.²⁹
5. Suku Melayu atau Suku Malayu adalah salah satu suku (klan) yang tergolong banyak populasinya dalam kelompok suku Minangkabau.³⁰
6. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimakaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.³¹
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan jenis penelitian sosiologis. Penelitian Sosiologis yang digunakan adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³³ Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.³⁴ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Panungkek Datuak Gajah Tongga Koto Piliang
- 2) Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk
- 3) Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk
- 4) Niniak Mamak Suku Melayu
- 5) Pelaku Perkawinan Sesuku

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³⁵ Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode purposive. Metode Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁶

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat³⁷, terdiri dari:
 - a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Hukum Adat
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan

²⁶ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm. 42

²⁷ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm. 44

²⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eska Media Press, Jakarta: 2005, hlm.455.

²⁹ <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1>, diakses, tanggal, 11 Februari 2018.

³⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Malayu, diakses, tanggal, 11 Februari 2018.

³¹ Hayatul Ismi, *Loc.cit*

³² Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

³³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 172.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1998, hal.79.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 91

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.52.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁸

- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan.
- b. Kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, namun dengan menguraikannya secara deskriptif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Prof. Subekti mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁰ Begitupun dengan Kaelany H.D yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.⁴¹ Perkawinan telah mengubah orang asing

menjadi keluarga, keluarga dan masyarakat yang mengikat bersama.⁴²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Perkawinan itu:⁴⁴

- a. Berlangsung seumur hidup
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- c. Suami istri membantu untuk

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat formil adalah tata cara prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.⁴⁵

Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:⁴⁶

- a. Persyaratan orangnya
 - 1) Berlaku umum bagi semua perkawinan
 - i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
 - ii. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita
 - iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang
 - iv. Bagi wanita tidak berada dalam jangka waktu masa tunggu atau masa *iddah*

⁴² Withroe v Edward, 2005, The General Assembly of Virginia, hlm. 9.

⁴³ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴ Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 61.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.* hlm.272

⁴⁶ *Ibid*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.23.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 100.

- 2) Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu
 - i. Tidak terkenan larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
 - ii. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. Izin yang harus diperoleh:
 - 1) Izin orang tua/ wali calon mempelai
 - 2) Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami)

B. Tinjauan Umum tentang Adat Minangkabau

1. Nilai-Nilai Dasar Minangkabau

Nekek moyang orang minangkabau setelah berguru kepada “*alam takambang*” mampu pula membaca tanda-tanda alam. Ia nampak lebih arif dalam meletakkan dasar-dasar adat. Dari hasil renungan itu lahir lah pembagian adat yang empat yakni:⁴⁷

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah ketentuan yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang berlaku secara universal, adat yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk karena hujan. Ketentuan yang dinamakan “*sunatullah*” atau wet alam (*natuurwet*).

b. Adat nan Diadatkan

Ajaran adat ini merupakan peninggalan dari peletak dasar adat minangkabau Parpatih Sabatang dan Katumanggungan serta Suri Dirajo, antara lain hidup bersuku-sako, kekerabatan menurut ibu. Itulah yang disebut kekerabatan matrilineal.

Adat nan diadatkan merupakan undang-undang dasar adat yang berlaku di Alam Minangkabau. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan, *nan indak lipu karena hujan, indak lakang karena paneh. “cupak batalago panuah, gantang basimaharajo lelo*, menjadi pakaian pembalut tubuh, *tidak akan ungkai selama-lamanya”*.

Hakikat dari *Adat nan diadatkan* tetap menjadi pegangan dan tak pernah bergeser dari dahulu sampai sekarang. Dari nenek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan. Demikian juga halnya mengenai sako, gelar kepenghuluan, dan pusako yang menjadi milik kaum secara bersama (kolektif). Selanjutnya perangkat adat di nagari sampai ke rumah gadang yang bertungganai. Susunannya tetap tidak bergeser.

Mengenai *Adat nan sabana adat* dan *Adat nan diadatkan* disebut nilai-nilai dasar atau sifat-sifat pokok yang merupakan titik tolak pandang hidup (falsafah) adat minangkabau.

c. Adat nan Taradat

Ketentuan ketentuan yang berlaku di selingkar nagari berdasarkan hasil keputusan ninik mamak (para penghulu) dalam nagari. Tentang hukum (*cupak sepanjang batuang*), beradat di nagari atau yang berhubungan dengan masyarakat luar kenagrariannya (adat sepanjang jalan), tentang sanksi adat, hutang adat, denda dan norma lainnya. Tentang pakaian adat, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belelangnya, membangun rumah adat dan mengubah atau berniat hendak membuka rumah adat dan sebagainya.

d. Adat Istiadat

Resam (kebiasaan) setiap nagari. Bisa juga resam Rajo atau adat istiadat beraja yang disebut juga *Panghulu Pucuak*, *pucuk suku* dan lain-lain. Tata cara adat nikah kawin, adat andan pasumandan, adat babako-babaki.

Contohnya tentang nikah yang termasuk *Adat nan diadatkan*, pelaksanaannya menurut *syarak mangato*, *adat mamakai*. Sedangkan tata upacaranya (adat nikah-kawin, pinang-maminang, jemput antar, menjalang mertua, istiadat alek jamu, kenduri dan pesta) termasuk adat istiadat.

Adat istiadat dan *adat nan taradat* boleh berubah atas kesepakatan. Keduanya dinamakan nilai instrumental atau nilai praktis, nilai dukung yang menyangkut rutinitas hidup sehari-hari yang dapat saja berubah. Nilai-nilai dasar tak akan berubah. Nilai dasar adat minangkabau yakni *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

⁴⁷ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm. 11.

2. Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam masyarakat minangkabau diatur menurut adat, syarak dan undang-undang atau peraturan. Perkawinan itu merupakan urusan bersama kedua kerabat kaum yang bersangkutan.⁴⁸

Perkawinan bersifat eksogami artinya dilakukan diluar sukunya. Artinya dilarang perkawinan sesuku. Seorang laki-laki melangsungkan perkawinan atau menikah tidak termasuk kedalam kaum kerabat istrinya dan ia tetap menjadi anggota kerabatnya. Menurut adat minangkabau setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mempunyai fungsi dalam kerabat kaumnya dan diluar kerabatnya. Anak yang lahir dari perkawinan akan menjadi anggota kaum ibunya.⁴⁹

Perkawinan minangkabau bersifat matrilineal. Setelah terjadi perkawinan, pengantin laki-laki akan diantarkan oleh kerabatnya ke rumah istrinya dan kemudian menetap di rumah (kerabat) istrinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Masyarakat Suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

1. Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Padang Sibusuk

Nagari Padang Sibusuk merupakan suatu nagari dengan adat minangkabau. Nagari Padang Sibusuk memiliki Kerapatan Adat Nagari sebagai suatu lembaga yang mengatur urusan adat di dalam Nagari. Nagari Padang Sibusuk terdapat 6 suku yaitu Caniago, Sikumbang, Dalimo, Ponggang, Cupak dan Melayu.⁵⁰

Setiap suku yang ada tentu memiliki niniak mamak yang memimpin suku tersebut. Peranan niniak mamak dalam suatu kaum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap anggota sukunya. Gelar niniak mamak yang didapat tersebut merupakan suatu sako yang

diwariskan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan laki-lakinya.⁵¹

Seorang laki-laki di minangkabau itu memiliki 2 peran sekaligus, yaitu sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya dan sebagai mamak untuk kemenakannya. Ia tidak hanya menjaga dan membimbing anaknya saja namun juga kemenakannya.⁵² Peranan mamak ialah “*anak dipangku, kemenakan dibimbiang*”. Salah satu kewajibannya ialah membimbing kemenakannya. Membimbing kemenakan diartikan mendidik kemenakan dalam hidup secara individu dan sebagai anggota masyarakat.⁵³

Dalam sebuah pelaksanaan acara perkawinan di Padang Sibusuk pun seorang mamak lebih memiliki banyak peran dari pada seorang ayah. Bahkan dulunya yang mencarikan jodoh untuk seorang anak perempuan yaitu mamaknya. Hal ini dikarenakan yang mengurus acara tersebut yaitu keluarga ibu terutama mamak. Proses pelaksanaan perkawinan di Padang Sibusuk yaitu:

a. Pandang Jauah

Pandang jauah ini dilakukan oleh seorang ibu. Ibu akan melihat melihat mana seorang lelaki yang bisa dijadikan sebagai menantunya. Biasanya ibu akan mencari calon menantu yang dengan kriteria seperti melihat bibit, keadaan sosilogis dan keadaan ekonomi. Bibit yaitu yang dilihat di laki-laki berasal dari keluarga mana, siapa ibu dan bapaknya siapa mamaknya, apa sukunya, bahkan dahulu jika seorang keturunan niniak mamak maka mereka akan cenderung mencari dari orang yang keturunan niniak mamak juga.⁵⁴

Keadaan sosiologis yang dimaksud yaitu mencari tahu apakah keluarga si laki-laki pernah atau tidak melanggar aturan terutama aturan adat. Keadaan ekonomi yaitu apakah si calon laki-laki sudah memiliki pekerjaan karena meskipun seorang

⁵¹ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁵² Wawancara dengan Bapak Pandito Bosai, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Rabu 15 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁵³ Zulkarnaini, *Op.cit*, hlm.85.

⁵⁴ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁴⁸ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm. 46.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 47

⁵⁰ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

perempuan memiliki *harato pusako* dari keluarganya tetap yang memberikan nafkah tentu saja suaminya.

b. *Maresek*

Proses *manapiak bandua (maresek)* ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, untuk menyampaikan maksud keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki proses *maresek* ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua (ibu-bapak) pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam pertemuan ini pihak keluarga laki-laki akan menanggapi dulu beberapa hari untuk memberikan jawaban, karena mereka akan merundingkannya terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki.⁵⁵

Maresek ini dilakukan oleh kaum ibu dari keluarga perempuan. Kaum ibu akan datang ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa buah tangan berupa pisang. Kedatangan kaum ibu dari pihak perempuan nantinya akan disambut juga oleh kaum ibu dari pihak laki-laki. Maksud tujuan kedatangan yaitu untuk menyampaikan bahwa mereka ingin menjadikan anak laki-laki tuan rumah sebagai menantu mereka.⁵⁶

c. *Pertemuan mamak (maminang)*

Setelah selesai proses *maresek* selanjutnya mamak dari pihak perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki dan akan disambut oleh mamak dari pihak laki-laki sebagai tuan rumah. Maksud kedatangan mamak pihak perempuan yaitu untuk meminta kemenakan laki-laki si tuan rumah untuk dijadikan menantu mereka.⁵⁷

Utusan dari pihak perempuan datang meminang ke kaum kerabat laki-laki dan pinangan disampaikan kepada niniak mamak dari pihak laki-laki. Hal ini

sesuai dengan pepatah adat “ *kawin jo niniak mamak nikah jo parampuan* ”.⁵⁸

d. *Batando*

Batando dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan kembali mendatangi mamak dari keluarga laki-laki. Ini dimaksudkan untuk mengikat secara adat pihak laki-laki dan perempuan dan juga untuk menentukan tanggal pernikahan dan *baralek*. Pada prosesi ini keluarga laki-laki akan memberikan sebuah tanda kepada mamak perempuan. Tanda biasanya bisa berupa gelang. Gelang itu dibawa pulang dan akan dilihat oleh ibu si perempuan kepada keluarganya untuk memberitahukan tanggal pernikahan anaknya.⁵⁹

Pada saat *batimbang tando* ini kedua belah pihak keluarganya akan menentukan hari baik bulan baik untuk melaksanakan pesta pernikahan, dan syarat lainnya yang harus dipenuhi serta bentuk pelaksanaan pesta yang akan dihadapi bersama.⁶⁰

e. *Akad (manikahkan)*

Akad nikah biasanya dilakukan di mesjid atau di rumah keluarga perempuan. Pada akad ini dilakukan ijab oleh wali si perempuan dan kabul oleh si calon suami. Sebenarnya setelah dinikahkan yang dihari oleh keluarga kedua belah pihak keluarga, mereka resmi sebagai suami istri. Namun, karena proses *manjampuk marapulai* belum dilaksanakan maka pihak laki-laki belum boleh tinggal serumah dengan pihak perempuan. Pada acara pernikahan ini terjadi pula ijab kabul oleh wali pihak perempuan kepada calon suami yang diiringi dengan pemberian mahar kepada pihak perempuan oleh laki-laki. Mahar ini dapat berupa emas atau seperangkat alat shalat dan Al-Qur'an.⁶¹

⁵⁵ Zamris Dt. R Sigoto, *Op.cit.*, hlm.19.

⁵⁶ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁵⁷ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁵⁸ Zamris Dt. R Sigoto, *Op.cit.*, hlm.20.

⁵⁹ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶⁰ Zamris Dt. R Sigoto, *Loc.cit.*,

⁶¹ *Ibid*, hlm.21.

f. Mambosi

Mambosi dilakukan oleh beberapa orang kaum ibu dari pihak perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki pada satu hari sebelum acara dilaksanakan dan akan disambut oleh kaum ibu dari keluarga laki-laki. Kedatangan kaum ibu dari pihak perempuan ini dengan membawahi buah tangan berupa gulai kentang dengan maksud kedatangan yaitu memastikan menanyakan bagaimana calon *marapulai* apakah dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan acara pada esok harinya.⁶²

g. Manjampuk Marapulai

Utusan dari keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga laki-laki untuk menjemput *marapulai*. *Marapulai* lalu akan diantar oleh keluarganya ke rumah keluarga *anak daro* dengan arakan yang diiringi oleh bapak-bapak yang bermain rebana. Setelah sampai di rumah keluarga perempuan *marapulai* dibawa masuk ke dalam rumah untuk makan bersama dengan mamak yang mengantarnya. Setelah itu diumumkan lah *gala* dari *marapulai* di depan tamu yang datang. Setelah itu *anak daro* duduk di pelaminan sembari tamu undangan memberikan kado untuk satu persatu disebutkan dan dibuka langsung pada saat acara berlangsung.⁶³

h. Mambalikan Tando

Ini dilakukan sehari setelah acara manjampuk *marapulai*. Kaum ibu dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa dulang yang berisikan makanan. Makanan yang dibawa yaitu siriah yang diletakkan di dalam *carano*, kue-kue kering, kue bolu, *kalamai*, *paniriam*, *botiah* dan lauk yang biasanya terdiri dari rendang, ayam goreng dan ikan goreng.⁶⁴

i. Manjalang Mintuo

Selesai pesta pernikahan (*baralek*) kegiatan *anak daro jo marapulai* adalah saling melakukan kunjungan ke rumah *dunsanak anak daro jo marapulai*. Acara ini disebut manjalang mintuo, yang dilaksanakan setelah empat atau lima hari usai pesta perhelatan.⁶⁵

Suami dan istri mengunjungi rumah sanak saudara dari kedua belah pihak dengan membawa rantang yang berisikan nasi, lauk dan agar-agar. Lalu orang yang menerima akan membalas dengan memberikan sejumlah uang yang diletakkan di dalam rantang.⁶⁶

2. Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Suku Melayu

Pada masyarakat suku Melayu, perkawinan dengan sesama anggota suku melayu bisa saja dilakukan asalkan mereka berasal dari rumah gadang yang berbeda. Hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh masyarakat di Nagari Padang Sibusuk.

Perkawinan sesama suku Melayu bisa mereka lakukan asalkan mereka berasal dari rumah gadang yang berbeda. Hal ini dikarenakan sudah menjadi suatu kesepakatan dari niniak mamak suku melayu.

Padahal pelaksanaan perkawinan termasuk pada adat nan diadatkan. *Adat nan diadatkan* merupakan undang-undang dasar adat yang berlaku di Alam Minangkabau. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan, *nan indak lipur karena hujan, indak lakang karena paneh*. “*cupak batalago panuah, gantang basimaharajo lelo*, menjadi pakaian pembalut tubuh, *tidak akan ungkai selama-lamanya*”.⁶⁷

Hakikat dari *Adat nan diadatkan* tetap menjadi pegangan dan tak pernah bergeser dari dahulu sampai sekarang. Dari nenek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan.⁶⁸

Contohnya tentang nikah yang termasuk *Adat nan diadatkan*, pelaksanaannya menurut *syarak mangato, adat mamakai*. Sedangkan tata upacaranya (adat nikah-kawin, pinang-

⁶² Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶³ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶⁴ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶⁵ Zamris Dt. R Sigoto, *Op.cit*, hlm. 22.

⁶⁶ Wawancara dengan Hasmizon Pandito Malin Putih Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶⁷ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm.12

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 13.

maminang, jemput antar, menjalang mertua, istiadat alek jamu, kenduri dan pesta) termasuk adat istiadat.⁶⁹

Adat istiadat dan adat nan taradat boleh berubah atas kesepakatan. Keduanya dinamakan nilai instrumental atau nilai praktis, nilai dukung yang menyangkut rutinitas hidup sehari-hari yang dapat saja berubah.⁷⁰

Perkawinan di minangkabau bersifat eksogami. Perkawinan bersifat eksogami artinya dilakukan diluar sukunya. Artinya dilarang perkawinan sesuku. Seorang laki-laki melangsungkan perkawinan atau menikah tidak termasuk kedalam kaum kerabat istrinya dan ia tetap menjadi anggota kerabatnya. Menurut adat minangkabau setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mempunyai fungsi dalam kerabat kaumnya dan diluar kerabatnya. Anak yang lahir dari perkawinan akan menjadi anggota kaum ibunya.⁷¹

Jika dilihat dari sifat perkawinan eksogami di minangkabau yang mengharuskan dilakukan diluar suku. Maka hal ini tentu saja menentang adanya perkawinan sesuku dan juga perkawinan termasuk pada adat nan diadatkan sehingga sudah jelas bahwa perkawinan sesuku tidak boleh dilakukan oleh masyarakat minangkabau.

B. Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku oleh Masyarakat Suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

1. Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Padang Sibusuk

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya.⁷² Perkawinan masyarakat minangkabau bersifat eksogami. Perkawinan bersifat eksogami artinya dilakukan diluar sukunya. Artinya dilarang perkawinan sesuku. Seorang laki-laki melangsungkan perkawinan atau menikah tidak termasuk dalam kaum kerabat istrinya dan ia tetap menjadi anggota kerabatnya.⁷³

Adat minangkabau melarang kawin sesuku. Seorang laki-laki tidak dibenarkan

kawin dengan perempuan yang satu suku dengannya. Jika seseorang menikah dengan orang yang satu suku dengannya maka akan menjadi bahan ejekan di dalam nagari. Orang yang menikah sesuku disebut "*tamakan pokok*". Perkawinan yang bukan sesuku ini disebut perkawinan luar suku.⁷⁴

Larangan perkawinan sesuku ini masih dipegang dan ditaati oleh masyarakat Nagari Padang Sibusuk. Larangan perkawinan dengan orang satu suku dikarenakan orang satu suku itu dianggap *badunsanak* (bersaudara). Larangan ini merupakan suatu aturan yang telah ada dari dahulu dan turun temurun sampai sekarang.⁷⁵

Di Nagari Padang Sibusuk bagi mereka yang melakukan perkawinan sesuku akan diberikan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa dibuang sepanjang adat dan diusir dari kampung.⁷⁶

Dibuang sepanjang adat yaitu mereka yang melanggar akan diberikan sanksi berupa dikucilkan dalam masyarakat. Bukan hanya si pelaku saja namun keluarganya juga akan dikucilkan. Keluarga si pelaku juga akan dikucilkan dengan tidak akan mengikutsertakan niniak mamak mereka dalam musyawarah adat yang diadakan di nagari.⁷⁷

Pelaku juga akan diberi sanksi berupa diusir dari kampung. Pelaku harus pergi meninggalkan kampung. Pelaku akan pergi dan tidak akan berani lagi untuk kembali. Meskipun mereka pulang kampung karna ada keperluan, mereka tidak akan lama dan tidak akan pulang berdua ke kampung melainkan hanya sendiri sendiri.⁷⁸

2. Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Suku Melayu

Pada Masyarakat suku Melayu larangan perkawinan sesuku pada saat ini

⁷⁴ Zulkarnaini, *Op.cit*, hlm.76.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Datuak Panungkek Gajah Tongga Koto Piliang, Pucuk Adat Nagari Padang Sibusuk, Kamis 20 Desember 2017, Bertempat di Padang.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Hasmizon Pandito Malin Putih, Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Hasmizon Pandito Malin Putih, Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Hasmizon Pandito Malin Putih, Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuk, Selasa 14 Agustus 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 17.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 47.

⁷² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

⁷³ *Ibid*.

sudah tidak lagi berjalan. Masyarakat suku Melayu bisa saja melakukan perkawinan sesama dengan anggota suku Melayu asalkan mereka berasal dari rumah gadang yang berbeda.

Jadi perkawinan luar suku menghindarkan perkawinan antara orang uang *badunsanak* (bersaudara), juga membuat hubungan dan kekerabatan baru dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam suatu nagari akan terjadi tali-temali (hubungan) antara satu individu dengan individu, antara individu dengan keluarga dan antara keluarga dengan keluarga. Semakin lengkaplah kekolektifan masyarakat minangkabau di dalam suatu nagari.⁷⁹

3. Dampak Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku tentu saja akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut yaitu:

a. Dampak Negatif Terhadap Kekerabatan

Namun sekarang telah terjadi perkawinan sesuku di masyarakat. Perkawinan sesuku besar dampaknya terhadap kekerabatan:⁸⁰

1. Kedudukan masing-masing kelompok telah diatur oleh adat itu sendiri. Apabila terjadi musyawarah atau upacara yang dilaksanakan dalam kaum atau suku tersebut, kedudukannya di rumah itu bersifat ganda. Artinya ia sebagai mamak dan juga sebagai *sumando*. Dalam suatu upacara atau perhelatan kaum, mamak duduk menghadap ke kamar atau membelakang jalan masuk. Sedangkan urang *sumando* duduk membelakangi kamar.
2. Siapakah bako anak-anak yang lahir dari suku itu? Padahal ia berada di suku itu juga. Disini akan terjadi kebingungan karna di satu sisi si anak anggota suku tersebut namun disisi lain ia juga membako pada suku itu juga.

Masyarakat minangkabau hidup secara berkelompok. Setiap orang dalam kelompok tersebut memiliki

kedudukannya masing-masing. Dalam suatu musyawarah atau upacara adat akan ada kedudukan masing-masing orang, baik itu sebagai mamak, *sumando*, *sipokok* ataupun *anak pisang*.

Pada suatu saat, ia merupakan seorang kemenakan dari mamak-mamaknya, artinya ia harus menghormati mamaknya dan akan menerima pewarisan *sako* dan *pusako* dari mamaknya. Pada saat lain ia menjadi mamak dari anak saudara-saudaranya yang perempuan. Disini ia bertindak sebagai pelindung dan pembimbing mereka. Di rumah ibunya ia berkedudukan sebagai mamak tungganai yang harus pandai menghadapi suami saudara-saudaranya yang perempuan. Demikian seterusnya sebagai semenda berhadapan dengan *mamak rumah* dan iparnya.⁸¹

Dengan demikian artinya seorang individu di Minangkabau, harus pandai menempatkan dirinya dalam hubungan kekerabatan. Hal ini sekaligus merupakan pendidikan kepemimpinan bagi anak-anak Minangkabau yang berhak menyandang sako kaumnya dan menerima tanggung jawab pewarisan serta membimbing kemenakan, kaum dan nagarinya.⁸²

Di Nagari Padang Sibusuk mamak berperan sebagai orang yang akan mengurus segala keperluan suatu musyawarah atau upacara adat dalam kaumnya dan ia akan duduk di menghadap ke kamar dan membelakangi jalan, sedangkan seorang *sumando* akan duduk membelakangi kamar dan menghadap ke jalan. Seorang *sipokok* akan berperan dalam menyiapkan segala keperluan konsumsi dan bertugas mencuci piring setelah selesai acara, sedangkan seorang *pasumandan* dalam suatu upacara adat bertugas memasak, dan seorang anak *anak pisang* akan bertugas menghidangkan makanan pada saat acara berlangsung.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm. 53

⁸¹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Op.cit*, hlm.

47.

⁸² *Ibid*

b. Dampak Positif Pada Masyarakat Suku Melayu

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari wawancara dengan niniak mamak suku Melayu yang menjelaskan bahwa perkawinan sesuku justru membawa dampak positif yaitu:⁸³

1. Mengurangi mamak membayar denda adat

Dengan tidak lagi berjalannya lagi larangan perkawinan sesuku ini pada masyarakat Melayu maka akan mengurangi kerepotan mamak dalam membayar denda adat yang akan dibayar atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh anak kemenakannya.

2. Mengurangi masalah dan mempermudah urusan

Dengan tidak dijalankannya lagi larangan ini juga akan mengurangi masalah yang timbul dikarenakan dalam suku tersebut mereka semua sama sama orang suku Melayu sehingga jika ada masalah maka akan lebih mudah untuk menyelesaikannya karena mereka *badunsanak* sehingga ada pertimbangan untuk mempermudah urusan.

Minangkabau maka berlaku adat Minangkabau sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori *receptie*. Sehingga masyarakat Minangkabau haruslah taat pada hukum adat Minangkabau dan perkawinan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat suku Melayu ini sudah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan sesuku terjadi Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Perkawinan sesuku terjadi pada masyarakat suku Melayu. Masyarakat suku melayu bisa saja melakukan

perkawinan dengan sesama suku Melayu asalkan mereka berasal dari rumah gadang yang berbeda.

2. Penerapan larangan perkawinan sesuku sudah tidak berjalan lagi pada masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Masyarakat suku Melayu di Nagari Padang Sibusuk bisa saja melakukan perkawinan dengan sesama anggota suku Melayu asalkan mereka berasal dari rumah gadang yang berbeda. Perkawinan sesuku ini tentu membawa dampak terhadap kekerabatan.

B. Saran

1. Niniak mamak suku Melayu diharapkan dapat kembali membahas mengenai perkawinan sesuku pada masyarakat suku Melayu agar dapat mengurangi terjadinya perkawinan sesama suku Melayu. Hal ini dikarenakan sifat dari perkawinan di minangkabau yaitu eksogami. Eksogami yaitu perkawinan diluar suku dan juga bahwa perkawinan termasuk *Adat nan diadatkan* yang mana *Adat nan diadatkan* merupakan undang-undang dasar adat yang berlaku di Alam Minangkabau . Hakikat dari *Adat nan diadatkan* tetap menjadi pegangan dan tak pernah bergeser dari dahulu sampai sekarang. Dari nenek turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, pelaksanaannya menurut *syarak mangato, adat mamakai*. Sedangkan tata upacaranya (adat nikah-kawin, pinang-maminang, jemput antar, menjalang mertua, istiadat alek jamu, kenduri dan pesta) termasuk adat istiadat. Adat istiadat inilah yang dapat berubah dan berbeda di setiap daerahnya.
2. Diharapkan Niniak mamak suku Melayu dapat kembali menerapkan larangan perkawinan sesuku. Hal ini dikarenakan perkawinan sesuku akan berdampak terhadap kekerabatan sehingga dapat menimbulkan kebingungan terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku karena ia memiliki kedudukan yang ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Jeni Gusmardi Pandito Kari, Niniak Mamak di Nagari Padang Sibusuk, Senin 12 Maret 2018, Bertempat di Nagari Padang Sibusuk.

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi, Kristal Multimedia.
- Erwin, 2006, *Tanah Komunal Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang, Andalas University Press.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Hakimy, Idrus, 2004, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Hanifah, Mardalena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Ismi, Hayatul. 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Pekanbaru, UR Press.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2015, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2002, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Padang, Sako Batuah.
- Mahyudin, Suardi dan Rustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minangkabau Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, Jakarta, CV Citamama Mandiri.
- Pide, A Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana.
- Prodjomidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- Saragih, Djaren, 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Bandung, Tarsito.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sigoto, Zamris Dt R, 2013, *Budaya Alam Minangkabau*, Padang, Jasa Surya.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wigndipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Gunung Agung.
- Zulkarnaini, 2013, *Pendidikan Budaya Alam Minangkabau*, Padang, Jasa Surya.

B. Jurnal/Kamus

- Amicus Brief, 2009, "Brief of Amici Curiae Asian American Bar Association of the Greater Bay Area & 62 Asian Pacific American Organizations in Support of Respondents Challenging the Marriage Exclusion, 14 Asian Pac. Am. L.J. 33, Jurnal Westlaw.

Cece Cox, 2006, "To Have and to Hold - or Not: The Influence of the Christian Right on Gay Marriage Laws in Canada and the United States", *J. Inst. Just. Int'l Stud.* 23, *Jurnal Westlaw*.

Griswold v. Connecticut, 2001, In *Determining Whether An Applicant is The Child*, *Jurnal Westlaw*.

Hayatul Ismi, 2012, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, E-Journal BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No.01 2012.

Hayatul Ismi, 2012, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional" *Jurnal Ilmu Hukum*, E-Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No.01 2012.

Jonathan Herring, 2011, et. al., "Ante-nuptial agreements: fairness, equality and presumptions", *L.Q.R.*, 127(Jul), 335-339, 338, *Jurnal Westlaw*.

Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 No.2 Desember 2016.

Tengku Erwinsyahbana, 2012, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3 No.1 Tahun 2012.

Tri Kurnia Nurhayati, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eska Media Press, Jakarta.

Withroe v Edward, 2005, *The General Assembly of Vorgania*, *Jurnal Westlaw*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- Pokok Pemerintah Nagari, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2.

D. Website

<http://trc210.blogspot.co.id/2010/05/sejarah-padang-sibusuk.html?m=1>, diakses, tanggal, 20 Mei 2018.

<http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1>, diakses, tanggal, 11 Februari 2018.

<https://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/christiaan-snouck-hurgronje-teori-receptie/>, diakses, tanggal 10 April 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/SukuMalayu>, diakses, tanggal, 11 Februari 2018.

<https://padangsibusuk.desa.id/>, diakses, tanggal, 10 Desember 2018.

<https://perpushibah.blogspot.co.id/2014/04/teori-receptio-in-complexu-versus-teori.html>, diakses, tanggal 16 April 2018.

kbbi.web.id, diakses, tanggal 11 Februari 2018.